

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR HASIL REVISI UJIAN TERTUTUP	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Keaslian Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian	28
F. TINJAUAN PUSTAKA	29
1. Wilayah Negara	29
2. Wilayah Laut	33
3. Delimitasi Batas Maritim.....	56
4. Batas Wilayah Negara	60
5. Penegakan hukum	71
G. KERANGKA TEORI	74
1. Teori Tentang Penentuan Wilayah Perbatasan	75
2. Teori Suksesi Negara.....	88
3. <i>Transnational Organized Crime</i>	95
4. Konsep <i>Traditional Fishing Ground</i>	99
H. METODE PENELITIAN.....	105
1. Jenis Penelitian	105
2. Jenis Data.....	106

	3. Cara Mencari Data Penelitian.....	109
	4. Cara Menganalisa Data.....	110
BAB II	PERMASALAHAN DELIMITASI MARITIM ANTARA TIMOR LESTE - INDONESIA.....	112
	A. Sejarah Terbentuknya Batas Laut Timor Leste - Indonesia	112
	B. Prinsip Hukum Penetapan Batas Laut Timor Leste - Indonesia.....	116
	1. Metode Sama Jarak (<i>equidistance line</i>).....	119
	2. <i>Equitable Principle</i>	123
	C. Dasar Hukum Penetapan Batas Wilayah Maritim Timor Leste Dan Indonesia.....	127
	1. Penetapan Batas Wilayah TL - RI	127
	2. Penetapan Batas Laut Wilayah TL - RI	143
	3. Hak dan Kewajiban TL Sebagai Negara Pantai	149
	4. Kewajiban Timor Leste Menghormati Hak Perikanan Tradisional Nelayan Indonesia	158
	D. Upaya Pemerintah Timor Leste - Indonesia dalam Menyelesaikan Batas Delimitasi Maritim.....	165
	1. Upaya Penetapan Batas Wilayah Laut Teritorial Timor Leste - Indonesai	165
	2. Upaya Melakukan Proses Negoisasi	192
	a. Penyelesaian Sengketa Wilayah Darat Timor Leste -Indonesia	195
	b. Negoisasi (Negotiation)	196
	3. Membentuk Dewan Batas Maritim	198
BAB III	PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH <i>OVERLAPPING</i> ANTARA TIMOR LESTE - INDONESIA.....	203
	A. Status Timor Leste Sebagai Negara Pantai	203
	B. Peraturan-Peraturan Hukum Terkait dengan Perbatasan Maritim.....	207
	1. Peraturan Perundang-undangan dan <i>Traktat</i>	208

2. Konstitusi Timor Leste	210
3. MoU dan <i>Dekreitu Governu Nu 5/2004 28 Juillu mengenai Regulamentu Geral Peskas no Akikultura</i>	211
C. Pembentukan Lembaga dan Tugas Lembaga dalam Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan Timor Leste	212
1. <i>Unidade Policia Maritima UPM), Unidade Patrulhamentu Fronteira – (UPF) dan Forças de Defesa de Timor Leste NAVAL (F-FDTL)</i>	218
2. Fungsi dan Tugas Lembaga dalam Penegakan Hukum diwilayah Perairan Timor Leste	222
a. <i>Forças De Defesa De Timor Leste - NAVAL (F-FDTL)</i>	224
b. <i>Unidade Policia Maritima - UPM)</i>	225
c. <i>Unidade Patrulhamentu Fronteira – (UPF)</i>	232
d. <i>Dirasaun Imigrasaun</i>	233
e. <i>Ministério da Agricultura e Pescas</i>	236
3. Harmonisasi Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Timor Leste.....	239
a. <i>Badang Penyidikan Kriminal Servisu Investigasaun Kriminal (SIK)</i>	241
b. <i>Kewenangan Jaksa (Juíz Nia Kompeténsia)</i>	242
c. <i>Kompetensi Absolute Pengadilan</i>	243
4. Upaya Badan Pengelola dalam Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Timor Leste.....	245
a. <i>Bidang Penegakan hukum dan Kebijakan</i>	247
b. <i>Bidang Keuangan</i>	252
c. <i>Bidang Sumber Daya Manusia</i>	254
d. <i>Bidang Infrastruktur</i>	255
D. Kebijakan dan Kerjasama antara Timor Leste - Indonesia.....	260

1. Kerjasama di Wilayah Perbatasan Timor Leste dan Indonesia	261
2. Kebijakan Regulasi.	267
 BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TIMOR LESTE TERKAIT DENGAN PENGATURAN SEMENTARA DI WILAYAH PERBATASAN YANG DELIMITASI MARITIMNYA BELUM DI TETAPKAN	275
A. Kondisi Umum Perbatasan Kedua Negara	275
B. Implementasi Kebijakan Terkait Dengan Pengaturan Sementara	284
C. Realisasi Kebijakan Timor Leste - Indonesia Dalam Melakukan (<i>Provisional Arrangements</i>).....	291
1. Pengaturan Wilayah Perbatasan Dalam Hukum Internasional Terkait dengan Perbatasan Yang Delimitasi Maritimnya Belum Ditetapkan.....	292
2. Kerjasama Timor Leste - Indonesia Dalam Penyelesaian Batas Wilayah yang Belum Di Tetapkan	302
a. Perjanjian Untuk Melakukan (<i>Provisional Arrangements</i> Timor Leste - Indonesia	305
b. Pembentukan <i>MoU Common Guidelines</i> Timor Leste Indonesia sebagai Alternatif untuk Melindungi Nelayan di Laut Timor.....	310
 BAB V PENUTUP	316
A. Kesimpulan	316
B. Sarang	319
 DAFTAR PUSTAKA	323